

**INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH : STUDI TERHADAP PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015**

TESIS

**OLEH :
NAMA: ISTIKHARAH
NO BP: 1720862022**

Pembimbing : 1. Dr. Asrinaldi, M.Si



**PROGRAM MAGISTER TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
TAHUN 2019**

**INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH : STUDI TERHADAP PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Sain pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

**OLEH :
NAMA: ISTIKHARAH
NO BP: 1720862022**

Pembimbing : 1. Dr. Asrinaldi, M.Si



**PROGRAM MAGISTER TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Nama : Istikharah
Program Studi : Tata Kelola Pemilu
Judul : **INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH : STUDI TERHADAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015**

Penelitian ini berawal dari kasus pelanggaran integritas oleh penyelenggara pemilu Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada 2015 di Kabupaten Sijunjung. Pelanggaran yang dilakukan adalah PPS yang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, PPS yang melanggar persyaratan untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu/pilkada, yaitu dengan keterlibatannya sebagai anggota partai politik dan pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan PPS yang melalaikan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelanggaran integritas dan menjelaskan integritas penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengikuti model penelitian studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran integritas oleh dua orang anggota PPS di Kabupaten Sijunjung dilakukan karena kurangnya pemahaman PPS terhadap tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu/pilkada, dan tidak memiliki kompetensi untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu/pilkada. Lebih jauh penelitian ini juga menggambarkan konflik kepentingan yang dihadapi oleh PPS dengan Pemerintah setempat (wali nagari) yang berkaitan dengan persoalan integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu/pilkada. Selanjutnya penelitin ini juga memberikan saran kepada KPU bahwa perlunya persyaratan dan regulasi lain untuk menjadi seorang penyelenggara *ad hoc*. Dan disamping itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi berkaitan dengan rekrutmen badan penyelenggara pemilu *ad hoc*;

Kata kunci : penyelenggara Pemilu, Integritas, Konflik Kepentingan

ABSTRACT

Name : Istikharah
Program Study : Tata Kelola Pemilu
Title : **INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH : STUDI TERHADAP PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2015**

This research originated from a case of integrity violations by the polling committee (PPS) election organizers in the 2015 Pilkada in Sijunjung Regency. The violations committed were PPS which showed their partiality to one of the pairs of candidates for the Regent and Deputy Regent of Sijunjung, PPS who violated the requirements to become an election organizer / election, namely by involvement as politik party members and ever running for legislative and PPS candidates who neglected their responsibilities in the implementation of the election stages. Therefore, this research aims to describe how integrity violations and explain the integrity of election administrators. This study uses a qualitative approach and follows the case study research model. Data retrieval is done by in-depth interviews and documentation studies. This study found that integrity violations by two PPS members in Sijunjung Regency were carried out due to a lack of understanding of PPS on the duties and functions of the election / election administration, and not having the competence to become an election organizer / local election. Furthermore this research also illustrates the conflict of interest faced by PPS with the local Government (guardian of nagari) relating to the issue of integrity as an election organizer / local election. Furthermore, the researcher also advised the KPU that there was a need for other requirements and regulations to become an ad hoc organizer. And besides that, there needs to be an increase in socialization related to the recruitment of ad hoc electoral organizing bodies;

Keywords: Election Committee, Integrity, Conflict of Interest